BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Memberikan jawaban dengan berbagai fasilitas kemudahan dan semakin tiada batas. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran.[1]

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

[1]Bank Indonesia, *Perkembangan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang Di Indonesia*, http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perkembangan/Contents/Default.aspx (22 april 2016).

Komponen sistem pembayaran barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement).[2]

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.[3]

Tabel 1.1. Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran

Negara	Keterlibatan dalam Sistem Pembayaran	Hubungan dengan Sistem Pembayaran
Afrika Selatan	Sedikit	Berpartisipasi dan menjalankan setelmen
Brunei	Sedikit	Dilakukan oleh *Brunei Association of Banks*
Cili	Sedikit	Aturan dan partisipasi
Hong Kong	Sedikit	Memberikan saran dalam regulasi
Perancis	Sedikit	Pengawas
Singapura	Sedikit	*Chairman Singapore Clearing House Association*
Amerika	Sebagian	Pengawas dan operator
Bangladesh	Sebagian	Kliring di kota-kota, Sonali Bank ditempat lain
Belanda	Sebagian	Pengawas dan operator
India	Sebagian	Kliring dimana ada kantor bank
Inggris	Sebagian	Pengawas dan operator *RTGS*
Pakistan	Sebagian	Kliring dimana ada kantor bank
Australia	Ya	*Payment System Board* dari *Reserve Bank of Australia*
Indonesia	Ya	Operator, regulator dan pengawas
Itali	Ya	Operator dan pengawas
Jepang	Ya	Operator dan pengawas
Jerman	Ya	Operator dan pengawas
Malaysia	Ya	Kliring dan transfer elektronik
Meksiko	Ya	Regulator
Saudi Arabia	Ya	Operator dan pengawas
Selandia Baru	Ya	Operator dan pengawas
Sri Lanka	Ya	Kliring

Sumber :Pusat Pendidikan dan Kebansentralan Bank Indonesia 2003

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga

[2]Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx (22 april 2016).

[3]Sri Mulyati Tri Subari, dan Ascarya, *Kebiajakan Sistem Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2003), hlm. 1.

kelancaran sistem pembayaran.[4] Keberadaan suatu sistem pembayaran yang aman dan handal dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk memperkuat pengendalian moneter dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sektor keuangan termasuk perbankan. Keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana yang efisien, aman, handal, dan berisiko rendah dapat mempermudah para pelaku ekonomi untuk melakukan akses terhadap berbagai keperluan pembayaran. Sebaliknya jika sistem pembayaran mengalami gangguan, maka yang terkena dampaknya adalah sistem keuangan secara menyeluruh.[5]

Salah satu elemen sistem pembayaran adalah Kliring[6]. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.[7] Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian utang piutang melalui mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 15 Februari 1909 antara 6 (enam) bank pertama di Jakarta (Saat itu bernama Batavia)[8].

Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian di Jakarta, pada

---

[4]Bank Indonesia, *Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)*, http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKILAT.aspx (22 April 2016).

[5]Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *op.cit* . hlm. 27.

[6]*Ibid*, hlm. 6.

[7]Bank Indonesia, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran, Edisi Tahun 2015*, http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/perkembangan/Pages/Daftar-Istilah-SP-2015.aspx (22 April 2016).

[8]Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 94.

akhir tahun 1989 saja volume warkat telah mencapai 82.052 lembar per hari dengan bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring menjadi tampak ruwet. Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No.21/9/KEP/DIR/ tanggal 23 Mei 1988 menetapkan perubahan sistem kliring lokal Jakarta menjadi sistem kliring otomatis. Sistem otomatis ini baru dapat diimplementasikan mulai 4 Juni 1990 untuk kliring penyerahan saja. Pada tahun 1994 sistem ini kemudian diganti dengan sistem otomasi kliring (SOKL).

Pada tahun 1996, rata-rata volume warkat kliring Jakarta mencapai hampir 217 ribu lembar per hari, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6% per tahun. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan dalam proses kliring baik di bank peserta maupun Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring. Sarana kliring tidak mampu mengikuti peningkatan jumlah warkat kliring, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam *settlement* dan penyediaan informasi hasil kliring, yang akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan merugikan lembaga terkait secara sistemik. Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia meresmikan penggunaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) untuk lokal Jakarta[9]

Dalam rangka mewujudkan efisiensi, kecepatan, keamanan dan kehandalan dalam transaksi sistem pembayaran non tunai khususnya melalui sarana kliring, maka sejak tanggal 29 Juli 2005 Bank Indonesia menerapkan sistem kliring yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Terkait

[9]Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 142.

dengan hal tersebut dan sebagai bagian dari penerapan SKNBI secara bertahap di seluruh Indonesia, maka pada tanggal 8 September 2006 sistem SKNBI diterapkan di Kalimantan Selatan menggantikan sistem kliring lokal.[10]

Berikut perputaran kliring di Indonesia dari Desember 2013 hingga Desember 2014

Periode	Volume	Nominal (dalam jutaan Rp.)
Desember 2014	10,436,980	280,154,325.69
November 2014	8,678,972	233,945,792.95
Oktober 2014	9,264,960	253,083,296.27
September 2014	9,262,079	251,541,263.63
Agustus 2014	8,766,067	239,949,687.81
Juli 2014	9,074,686	224,866,914.12
Juni 2014	9,185,770	247,089,720.44
Mei 2014	8,459,241	222,389,171
April 2014	8,894,575	236,584,109.39
Maret 2014	8,392,959	219,180,210.77
Februari 2014	8,287,064	217,616,939.58
Januari 2014	8,176,571	225,895,175.07
Desember 2013	10,013,207	247,148,406.92

Sumber: Bank Indonesia

Periode selanjutnya, dilakukan pengembangan sistem kliring di Indonesia dari SKNBI Generasi I menjadi SKNBI Generasi II. Sistem ini sudah mulai berjalan sejak tanggal 5 Juni 2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Mekanisme dan Peranan dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II dalam sistem pembayaran dengan judul

[10]Bank Indonesia, *Kalimantan Selatan Terhubung Sistem Kliring Nasional*, http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/kalsel/Documents/28f75b8992584a7699dd211acbb99e8aBoks2.pdf (22 April 2016).

“Peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
2. Mengetahui peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitiaan

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis, untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan menambah wawasan ataupun bahan referensi tentang salah satu sarana sistem pembayaran non tunai di Bank Indonesia yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II dan bahan bacaan bagi generasi selanjutnya yang ingin meneliti Sistem Kliring dari aspek lain.
   b. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
   c. Bagi pihak Bank semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan perkembangan sistem pembayaran non tunai.
   d. Bagi Masyarakat, adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang perkembangan sistem pembayaran saat ini dengan berkembangnya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan interpretasi secara tegas dan terperinci maksud dari judul "Peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan" sebagai berikut :

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang di suatu peristiwa atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang dan sebagainya yang berkedudukan dimasyarakat[11]. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peranan dari sebuah sistem kliring.
2. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu[12]
3. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.[13] Sedangkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II adalah sistem kliring terbaru yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bertugas untuk mencapai tujuan

[11]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

[12]Bank Indonesia, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran, Edisi Tahun 2015,* http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/perkembangan/Pages/Daftar-Istilah-SP-2015.aspx (22 April 2016).

[13]Julius R. Latumaerissa, *op. cit.* hlm. 107.

memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi dan nilai tukar. Dalam penelitian ini, Bank Indonesia adalah lembaga penyelenggara kliring atau yang berwenang menunjuk penyelenggara kliring lain di luar Bank Indonesia. Pengelolan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di Kalimantan Selatan melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dibawah Tim Sistem Pembayaran dengan Unit Operasional Sistem Pembayaran.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah Kliring pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Maka penulis menemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Kliring. Namun demikian, ditemukan subtansi yang berbeda dengan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Afandhi (C.100.030.147) Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2008 dengan judul *Peranan Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral di Bank Indonesia Surakarta.* Dalam penelitian tersebut meneliti tentang peranan dan arti penting kliring dalam lalu lintas pembayaran giral di Bank Indonesia Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dan Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan analisis, pelaksanaan kliring memiliki arti penting dalam menyelesaikan lalu lintas pembayaran giral bagi suatu bank, mempercepat dan mempermudah pembayaran tanpa harus membayar dengan uang tunai, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, mempermudah bagi bank-bank untuk menyelesaikan lalu lintas pembayaran giral bagi suatu bank.[14]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Budianto (00312146), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008 dengan judul *Evaluasi Terhadap Sistem Kliring Elektronik Nasional*. Dalam penelitian tersebut menguji bagaimana sistem, prosedur, dan manfaat dari Sistem Kliring Elektronik Nasional, serta menguji Sistem Kliring Elektronik Nasional dalam pemenuhan elemen-elemen Pengendalian Intern. Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu pada Bagian Kliring Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Kliring Elektronik Nasional memenuhi elemen-elemen Pengendalian Intern, yaitu dari segi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan[15]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Dirgantara (0152039), Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha Bandung,

[14]Riza Afandhi, "Peranan Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral di Bank Indonesia Surakarta" (Skripsi diterbitkan Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakart, 2008).

[15]Arief Budianto, "Evaluasi Terhadap Sistem Kliring Elektronik Nasional" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2008).

pada tahun 2008 dengan judul *Efisiensi Penerapan Sistem Kliring Nasional dalam Mengurangi Risiko Bank Indonesia dengan Mekanisme Failure to Settle (FtS).* Dalam penelitian tersebut meneliti tentang Manajemen Risiko Kliring dengan menggunakan mekanisme *Failure to Settle (FtS).* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam mengurangi risiko Bank Indonesia dengan mekanisme *Failure to Settle* menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko yang bersifat *multilateral netting*.[16]

Berdasarkan permasalahan di atas oleh beberapa peneliti, persamaan dapat dilihat dari aspek yang diteliti yaitu Kliring. Namun dapat dibedakan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang peranan kliring khusus pada sistem kliring terbaru yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang dinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi

[16]Angga Dirgantara, "Efisiensi Penerapan Sistem Kliring Nasional dalam Mengurangi Risiko Bank Indonesia dengan Mekanisme Failure to Settle (*FtS*)" Skripsi diterbitkan, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2008).

operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan

Bab II adalah Landasan Teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh, berisikan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubugan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data merupakan laporan hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Penyajian data yang terdiri dari data informan, data hasil wawancara, analisis data serta jawaban atas rumusan masalah

Bab V Penutup, disini penulis akhirnya membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.